

国民と国家の発展における女性の役割とリーダーシップの重要性

在大阪インドネシア共和国総領事館・総領事（2021年～）

ディアナ ES スティックノ

女性に権限を与えることは、国の国家開発の成功への鍵です。従って、女性をすべての意思決定プロセスに関与させる必要があります。包摂的なまちづくりを実現させるためには、特に女性がリーダーとして、あらゆる分野に関与することが必要です。

2030年の持続可能な開発目標（SDGs）の5番目の目標は、ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図ることで、女性のリーダーシップはこの目標達成のターゲットの一部です。女性のリーダーシップに関連する2つの主要な目標があります。第一に、女性の完全な社会参加と、あらゆる分野での意思決定において女性が主導する機会を均等に確保することです。第二に、ジェンダー平等を促進し、あらゆる分野において女性の能力を強化するための政策と規制を導入し、強化することです。

2022年G20の議長国として、インドネシア政府はインドネシア経済に果たす女性の重要な役割を支援し続けています。また、Women-20を通じて、起業家セクターにおける女性の役割を拡大し、中小零細企業の女性起業家がさらに成長を遂げる機会を提供することにも取り組んでいます。この課題に関して、インドネシアの戦略的パートナーでありG20の加盟国である日本の支援は、両国の女性の役割を推進する二国間関係と協力を強化するために、非常に重要と考えています。

インドネシア政府は、ジェンダー主流化の取り組みに対して強力に支援しています。法の下でのすべての市民の平等を保障する1945年制定のインドネシアの最高法規である憲法をはじめ、各関係省庁・機関の作業単位の政策に至るまで、ジェンダー主流化政策が概説されてきました。この取り組みは、国家中期開発計画及び政府機関向けのジェンダーに対応した計画と予算編成の方針の中にも示されています。

平等を達成するため、すべての人に機会と特別な待遇を受ける権利を与える1945年憲法の改正を含む、政治に参加する女性の人数に関する急速な進歩は、継続的な戦いです。さらに、2003年の法律第12号の制定により国会や、国民代表議会及び地方議会の議員選挙

に関する選挙に参加するすべての政党は、女性の代表が少なくとも 30 パーセント含まれることを義務付けられました。この積極的な取り組みを通じて、様々な分野での女性の参画が増え続けることが期待されます。

現在、インドネシアの政治と政府における女性の参画は増え続けています。2021 年 1 月現在、2019 年から 2024 年までの任期のインドネシアの国会議員には 123 人の女性議員（総議員数の約 21.39%）が在職しています。この数は、2004 年当時の女性議員の人数が議員の総人数のわずか 11.82%であった頃に比べて増加しています。現在インドネシアの閣僚では、外務大臣や、財務大臣、森林環境大臣、女性のエンパワーメントと子どもの保護大臣、労働大臣、社会福祉大臣が女性です。さらに、省以外の重要な 2 つの庁、飲料食品薬品監視庁長官と気象庁長官も女性です。

インドネシアの 2020 年の国勢調査の結果に基づくと、総人口は 270,315,430 人です。そのうち 50%は女性であり、大多数は生産年齢です。この数字は、女性が国の発展に貢献し、積極的な役割を果たすことができる、という大きな可能性を示しています。

ジェンダー主流化は進んでいるとは言われても、これらの取り組みは引き続きすべての関係者によって注目され、支持されなければなりません。2021 年のジェンダーギャップ指数は、156 ヶ国中、インドネシアは 101 位、日本は 120 位です。このランキングは、様々な分野でのジェンダー主流化の取り組みをさらに強化するための両国の推進力となるはず です。

両国は国家レベルでのジェンダー平等を支持する政策を採用しているにもかかわらず、家父長制と性差別の支持が社会的構築されてきたことを考えると、ジェンダー平等の問題は依然として解決すべき課題です。これら二つの課題はまだ女性の前進を妨げています。

性差別と闘うことができ、女性が意思決定のテーブルにつく機会が増えれば、インドネシアと日本のジェンダー平等と正義が実現すると私は確信しています。女性の利益が引き続き反映されるように、あらゆる意思決定の取り組みに女性が関与することが重要です。

(インドネシア語原文)

Perempuan yang berdaya merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, perempuan harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif, pelibatan perempuan di segala bidang, khususnya sebagai pemimpin atau *leaders*, merupakan suatu keniscayaan.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030, kepemimpinan perempuan menjadi bagian dari tujuan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ada dua target utama terkait kepemimpinan perempuan ini. Pertama, memastikan partisipasi penuh perempuan dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin pada semua level pengambilan keputusan. Kedua, mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan peraturan dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada semua level.

Di bawah Presidensi Indonesia di G-20 tahun 2022, Indonesia juga terus mendukung peran penting perempuan di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini, melalui Women-20, Pemerintah RI berkomitmen meningkatkan peran perempuan di sektor wirausaha, dan memberikan peluang bagi perempuan pelaku UMKM untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Dukungan Jepang sebagai mitra strategis Indonesia dan selaligus sesama negara anggota G-20 terhadap agenda ini akan sangat strategis bagi penguatan hubungan dan kerja sama bilateral untuk memajukan peran perempuan di kedua negara.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya pengarusutamaan gender. Dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yaitu UUD 1945, yang menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum - hingga kebijakan pada masing-masing satuan kerja kementerian/lembaga, kebijakan pengarusutamaan gender sudah dijabarkan. Komitmen tersebut juga ditunjukkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi instansi pemerintah.

Kemajuan yang pesat dalam konteks jumlah perempuan di politik merupakan perjuangan terus-menerus termasuk melalui amendemen UUD 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya, penetapan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD telah memberikan mandat bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Melalui langkah afirmatif ini, keterwakilan perempuan di berbagai bidang diharapkan dapat terus meningkat.

Saat ini keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia terus meningkat. Pada periode 2019-2024, per Januari 2021 terdapat 123 perempuan di DPR RI atau sekitar 21,39%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sejak tahun 2004, di mana jumlah

perempuan saat itu hanya 11,82% dari total jumlah anggota dewan. Dalam Kabinet Indonesia Maju, terdapat 6 menteri perempuan yang memegang isu-isu strategis, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Sosial. Selain itu, terdapat dua Kepala Lembaga Non-Kementerian penting yang juga dijabat oleh perempuan yaitu Kepala Badan POM dan BMKG.

Di Indonesia, jumlah populasi penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020 adalah 270.315.430 jiwa. 50% di antaranya adalah perempuan, dan mayoritas berada pada usia produktif. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi perempuan untuk berkontribusi dan berperan aktif bagi pembangunan nasional.

Meskipun telah mencatatkan berbagai kemajuan dalam pengarusutamaan gender, upaya tersebut harus terus dikawal dan didukung oleh seluruh pihak. Laporan Global Gender Gap tahun 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat 101 dari 156 negara, sementara Jepang berada pada peringkat 120. Peringkat tersebut sudah semestinya menjadi dorongan bagi kedua negara untuk semakin memperkuat upaya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang.

Meskipun kedua negara telah sama-sama memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender pada tingkat nasional, isu kesetaraan gender masih perlu terus diperjuangkan mengingat masih adanya konstruksi sosial yang berpihak pada sistem patriarki dan bias gender. Kedua hal ini masih menghalangi perempuan untuk maju.

Jika bias gender dapat kita lawan bersama, dan semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk duduk di meja pengambilan keputusan, saya yakin, kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dan Jepang akan dapat terwujud. Keterlibatan perempuan di setiap upaya pengambilan keputusan juga penting agar kepentingan perempuan dapat terus digaungkan.